

Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa Dalam Membangun Data Untuk Evaluasi Ketercapaian SDGs Desa

Vita Ratnasari ^{1*}, Agnes Tuti Rumiati ², Ismaini Zain ³,
I Nyoman Budiantara ⁴, Husna Mir'atin Nuroini ⁵,
Dea Saraswati Pramaningrum ⁶

¹⁻⁶ Departemen Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

* vita_ratna@its.ac.id

Abstrak

Kabupaten Mojokerto memiliki tantangan dalam pelaksanaan dan pemantauan ketercapaian SDGs Desa, khususnya dalam hal kualitas data dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Berdasarkan pengalaman serupa di Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, penyusunan SOP, dan penggunaan sistem informasi digital sangat efektif dalam memperbaiki tata kelola data pembangunan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi rendahnya literasi data SDGs di desa, ketiadaan panduan operasional, dan belum adanya sistem yang memungkinkan monitoring ketercapaian indikator secara mandiri di tingkat desa. Solusi yang diusulkan meliputi empat pendekatan utama. Pertama, pelatihan kepada perangkat desa terkait konsep dan indikator SDGs Desa serta teknik pendataan. Kedua, penyusunan dokumen SOP yang memberikan panduan teknis pengelolaan data. Ketiga, pengembangan dashboard digital berbasis web sebagai alat bantu untuk input, visualisasi, dan pelaporan data SDGs Desa. Keempat, pendampingan teknis daring selama dua bulan untuk memastikan penerapan SOP dan pemanfaatan dashboard berjalan efektif. Target luaran kegiatan ini mencakup produk-produk berbasis IPTEK seperti dashboard SDGs Desa, SOP pengelolaan data SDGs, serta dokumen ilmiah dan publikasi berupa jurnal nasional, book chapter, artikel media populer, video dokumentasi, dan policy brief. Semua luaran disesuaikan dengan karakteristik pusat kajian yang berfokus pada penguatan sistem informasi dan literasi data masyarakat desa. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama enam bulan (Mei–Oktober 2025) dan melibatkan sepuluh desa dampingan di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan dimulai dari survei awal dan pemetaan kebutuhan, dilanjutkan dengan pelatihan intensif, pengembangan sistem digital, pendampingan implementasi, hingga evaluasi dan publikasi hasil. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tercipta sistem pengelolaan data SDGs yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di desa-desa lainnya di Jawa Timur maupun secara nasional.

Kata Kunci: SDGs desa, tata kelola data, dashboard digital, pelatihan aparatur

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen pencapaian SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, yang mewajibkan penyalarsan target nasional hingga daerah serta penyiapan peta jalan dan RAD/TPB (SDGs) sebagai pedoman pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan. (Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, 2017). Untuk memperkuat tata kelola pemantauan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Permen PPN No. 1 Tahun 2023 yang memperbarui pedoman evaluasi nasional dan menekankan praktik berbasis data. (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Pada level akar rumput, SDGs Desa menyediakan kerangka indikator yang diturunkan dari SDGs nasional menjadi 18 tujuan desa serta dukungan sistem berupa Sistem Informasi Desa (SID) dan *Dashboard* SDGs Desa untuk input dan pemantauan indikator secara daring. (Kementerian Desa PDTT, 2026). Ekosistem data desa ini melengkapi Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indeks komposit ketahanan sosial-ekonomi-lingkungan yang setiap tahun diperbarui dan tersedia melalui Portal Satu Data Kementerian Desa. (Kementerian Desa PDTT, Portal Satu Data, 2024). Di sisi statistik resmi, BPS menerbitkan indikator TPB/SDGs terkini sebagai rujukan harmonisasi indikator dan *benchmark* nasional-daerah. (BPS, 2024). Sejalan itu, inisiatif Open Government Indonesia (OGI) mendorong keterbukaan data dan kolaborasi multipihak untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan. (OGI/Bappenas, 2026). Dalam konteks tersebut, program pengabdian ini memfokuskan penguatan literasi data dan tata kelola di desa, agar proses perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan lebih akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan *evidence-based policy* digunakan untuk memastikan penentuan prioritas didukung data yang sahih dan relevan. (Iswanto, 2023; Ramadanti, 2019).

Sebagaimana telah dilaksanakan pada program pelatihan serupa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, penguatan kapasitas desa terbukti mampu meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam memahami konsep SDGs dan melakukan pendataan secara sistematis. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi SDGs dan pentingnya keterlibatan desa dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, peserta dari desa dilatih untuk memahami struktur indikator SDGs Desa, cara pengumpulan data yang benar, dan bagaimana data tersebut bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan desa. Pelatihan yang dilakukan mencakup praktik langsung pengisian kuesioner, simulasi pelaporan, dan diskusi mengenai tantangan pendataan di lapangan. Hasil dari kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola data berbasis SDGs. Selain itu, desa juga mendapatkan pendampingan dalam membentuk tim pendataan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan masyarakat.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa desa membutuhkan alat bantu berupa *dashboard* dan format pendataan standar yang mudah digunakan. Pelatihan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa perlu ada SOP pendataan SDGs yang dapat diadopsi secara nasional. Kegiatan di Sidoarjo juga memperlihatkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi sangat strategis untuk membangun literasi data di level desa. Pembelajaran dari

kegiatan di Sidoarjo menjadi inspirasi untuk direplikasi di Kabupaten Mojokerto, dengan menyesuaikan konteks wilayah dan kesiapan masing-masing desa.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan data dan pelaporan capaian SDGs menjadi fokus utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dengan adanya data yang kuat dari desa, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan lebih mudah menyusun kebijakan pembangunan yang terukur dan berbasis bukti. Kegiatan ini sekaligus mendorong kemandirian desa dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan utama berupa belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa dalam pendataan, pengelolaan, dan evaluasi capaian SDGs Desa. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan mitra utama serta aparatur desa sebagai subjek kegiatan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Kegiatan berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan pusat kegiatan bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto sebagai mitra utama. Selain itu, kegiatan juga melibatkan sepuluh desa sasaran yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi implementasi dan uji coba. Secara geografis, lokasi kegiatan berada pada kawasan Gerbangkertosusila dengan aksesibilitas yang relatif baik, sehingga mendukung efektivitas koordinasi dan pendampingan. Peta lokasi kegiatan dan desa sasaran disajikan dalam peta wilayah untuk memberikan gambaran spasial mengenai sebaran lokasi pengabdian. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, yaitu pada periode Mei hingga Oktober 2025, yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan inti, pendampingan, hingga evaluasi akhir.

Mitra kegiatan dalam kegiatan ini adalah aparatur desa, khususnya operator dan perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pembangunan, serta lembaga perencana daerah. Mitra utama kegiatan adalah Bappeda Kabupaten Mojokerto yang berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara tim pengabdian dengan desa-desa sasaran. Penentuan desa sasaran dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain tingkat kesiapan desa, nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang relatif rendah, serta pemerataan wilayah antarkecamatan (Kemendesa, 2026; BPS, 2024). Dari hasil seleksi awal, ditetapkan sepuluh desa sebagai lokasi *pilot project* yang diharapkan dapat menjadi percontohan dan direplikasi pada desa lain di Kabupaten Mojokerto.

Pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. Tahap awal diawali dengan survei pendahuluan dan koordinasi dengan mitra untuk memetakan kebutuhan, kesiapan sumber daya manusia, serta kondisi eksisting pengelolaan data SDGs Desa. Tahap selanjutnya adalah penyusunan modul pelatihan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola data SDGs Desa yang disesuaikan dengan konteks dan kapasitas desa. Kegiatan inti dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan secara luring yang mencakup pemahaman konsep SDGs Desa, indikator dan metode

pengukuran, teknik pendataan, serta praktik pengolahan dan pelaporan data. Selain itu, dilakukan demonstrasi dan uji coba penggunaan *dashboard* digital SDGs Desa sebagai alat bantu visualisasi dan monitoring capaian indikator. Untuk memastikan keberlanjutan implementasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis secara daring selama beberapa bulan, yang bertujuan membantu desa dalam menerapkan SOP, menginput data, serta menyelesaikan kendala teknis yang muncul di lapangan.

Evaluasi dilaksanakan secara berlapis, mulai dari evaluasi proses hingga evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan melalui pemantauan kehadiran, keaktifan peserta, serta umpan balik selama kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, menilai kemampuan desa dalam menerapkan SOP dan menggunakan *dashboard*, serta menganalisis laporan monitoring selama masa pendampingan. Selain itu, dilakukan evaluasi akhir bersama mitra untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Melalui metode evaluasi ini, diharapkan kegiatan pengabdian tidak hanya mencapai target jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi penguatan tata kelola data dan pembangunan desa berbasis SDGs.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi: Output, Dokumentasi, dan Tanggapan Peserta

Secara umum, hasil mengonfirmasi bahwa pelatihan terstruktur dan pendampingan berkelanjutan merupakan prasyarat peningkatan kinerja pengelolaan data desa; literatur menunjukkan perbaikan nyata ketika pelatihan disertai perangkat operasional (SOP) dan dukungan kelembagaan. (Afrizal et al., 2022; Utomo & Wardhani, 2025). Di level praktik, kegiatan pelatihan dapat mempercepat transfer kompetensi karena materi dirancang relevan dengan tugas harian operator, berorientasi pemecahan masalah, dan memanfaatkan pengalaman kerja peserta sebagai sumber belajar. (Fuady, 2021). Adapun kegiatan sosialisasi SDGs Desa dilaksanakan pada 7 Agustus 2025 di Kantor Bappeda Kabupaten Mojokerto sebagai langkah awal untuk membangun pemahaman dasar aparatur desa terkait konsep pembangunan berkelanjutan dan pentingnya data dalam proses perencanaan. Sosialisasi ini menghasilkan beberapa output penting berupa materi pemaparan mengenai:

1. Komitmen ITS dalam mendukung SDGs Desa
2. Tantangan Pembangunan Desa Berkelanjutan
3. Mengapa SDGs Desa Penting
4. Pilar Pembangunan Desa berbasis SDGs
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa (2024)
6. Pengukuran & Indikator Capaian SDGs Desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa, khususnya operator desa, terkait implementasi SDGs Desa. Selain itu, diharapkan melalui pengabdian masyarakat ini, nantinya dapat mendorong perencanaan pembangunan desa berbasis data yang terukur dan berkelanjutan serta memperkuat koordinasi antara desa,

Bappeda, dan lembaga akademik (ITS) dalam mendukung pencapaian SDGs Desa (Anggraeni, 2025). Dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan dihadiri oleh 50 operator desa dari berbagai kecamatan, dengan suasana interaktif yang tercipta melalui sesi tanya jawab dan diskusi tematik.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Tanggapan peserta menunjukkan bahwa aparatur desa merasakan manfaat langsung dari sosialisasi ini. Peserta dari Desa Randuharjo, misalnya, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan secara *bottom-up* mulai dari RT/RW, kemudian dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes). Perencanaan tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan, penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan melalui BUMDes. Selanjutnya disampaikan bahwa skala prioritas pembangunan di desa ditentukan melalui Musdes, dengan kewenangan kepala desa untuk menyesuaikan anggaran dana desa, dan meskipun visi-misi kepala desa berbeda antar wilayah, SDGs Desa saat ini mulai diintegrasikan dalam kebijakan. Berdasarkan diskusi tersebut, diungkapkan juga bahwa evaluasi pembangunan dilakukan di tingkat kecamatan untuk menilai realisasi dan manfaat program, serta melalui laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati, sementara data eksisting dari tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan selanjutnya. ITS menekankan perlunya perencanaan berbasis data dan pentingnya kuantifikasi agar data desa benar-benar bermanfaat dalam menentukan prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Desa Beringharjo Kecamatan Sooko menyampaikan adanya kendala implementasi SDGs Desa sejak 2021, terutama karena aplikasi tidak dapat diakses meskipun dana pendataan telah dialokasikan, ditambah desa belum menerima data dari statistik dan masih menghadapi keterbatasan SDM. Sementara itu, Bappeda menegaskan pentingnya data dari desa untuk mendukung perencanaan kabupaten, khususnya terkait infrastruktur, dan menekankan perlunya integrasi data antar instansi seperti Dinsos dan PUPR agar definisi dan pemanfaatan data menjadi seragam (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Pelatihan: Materi dan Peserta

Kegiatan pelatihan SDGs Desa yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2025 merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan berfokus pada penguatan keterampilan teknis aparatur desa dalam pendataan, pengolahan, dan pelaporan capaian SDGs. Pelatihan ini menghadirkan tim ahli dari ITS yang membawakan materi inti mencakup pengantar SDGs Desa, metode implementasi dan pengukuran indikator di tingkat desa, teknik manajemen data, serta pengukuran capaian SDGs berdasarkan tiga pilar utama yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain paparan materi, pelatihan juga dilengkapi praktik langsung (*hands-on practice*) yang memungkinkan peserta mempelajari cara mengisi instrumen SDGs Desa, melakukan validasi data, serta memahami cara menginterpretasikan indikator untuk kebutuhan perencanaan. Format penyampaian materi disusun secara sistematis, dimulai dari konsep umum, kemudian mengarah pada contoh spesifik dan aplikatif sehingga membantu peserta menghubungkan teori dengan praktik pengelolaan data di desa masing-masing.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan

Peserta pelatihan yang berjumlah 50 operator desa memberikan tanggapan positif terhadap kebermanfaatan materi dan kejelasan instruksi teknis yang diberikan. Banyak peserta mengakui bahwa sebelum pelatihan, sebagian operator desa masih bingung dalam membedakan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan. Materi dari narasumber membantu memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana indikator tersebut diukur dan digunakan dalam evaluasi pembangunan desa. Banyak operator desa mengakui bahwa kemampuan teknis dalam validasi dan analisis data masih terbatas. Peserta berharap adanya sesi pendampingan rutin khususnya terkait metode pengukuran dan penggunaan alat ukur SDGs Desa yang dikembangkan ITS.

Beberapa operator merasa instrumen yang disampaikan lebih mudah dipahami dibandingkan format sebelumnya, karena sudah tersinkronisasi dengan indikator SDGs Nasional dan SDGs Desa versi Kemendesa serta dilengkapi contoh indikator per pilar (sosial, ekonomi, lingkungan). Setelah mengikuti kegiatan, peserta menyadari bahwa SDGs Desa bukan sekadar kewajiban pengisian data, tetapi menjadi alat penting untuk mengukur capaian pembangunan desa secara menyeluruh dan memastikan tidak ada warga desa yang tertinggal. Peserta merasakan peningkatan pemahaman yang signifikan, terutama karena instrumen yang disusun tim ITS dinilai lebih mudah dipahami dan lebih terintegrasi dengan indikator SDGs Nasional maupun SDGs Desa Kemendesa. Dokumentasi kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh sesi, yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan, diskusi aktif, dan kesediaan untuk mengikuti pendampingan lanjutan guna mengimplementasikan alat ukur SDGs Desa. Dengan demikian, pelatihan ini berhasil meningkatkan kapasitas teknis aparatur desa dan memperkuat pondasi bagi penerapan tata kelola data SDGs yang lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan penguatan kapasitas SDGs Desa di Kabupaten Mojokerto telah berjalan sesuai rencana awal, dengan capaian awal berupa peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap konsep SDGs dan pentingnya pengelolaan data secara sistematis. Kolaborasi dengan Bappeda membuka peluang integrasi data SDGs ke dalam aplikasi Kerismojo, sehingga pelaporan dan evaluasi capaian SDGs dapat lebih efisien dan terpusat. Integrasi ini juga merespons kebutuhan desa yang selama ini terbebani dengan permintaan data berulang-ulang dari berbagai pihak.

Sebagai tindak lanjut kegiatan pengabdian ini, diperlukan penguatan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar data dan *dashboard* SDGs Desa dapat dimanfaatkan sebagai rujukan resmi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, khususnya operator dan perangkat desa, perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis. Model penguatan tata kelola data SDGs Desa yang telah diterapkan pada desa sasaran disarankan untuk direplikasi ke desa-desa lain dengan fasilitasi Bappeda. Selain itu, integrasi sistem data desa dengan sistem informasi daerah perlu terus dikembangkan untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi pelaporan. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting dilakukan guna memastikan keberlanjutan implementasi serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan desa.

Referensi

- Afrizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penataan administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (e-government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76–91.
- Anggraeni, M. D. (2025). Pengembangan dashboard monitoring SDGs Desa berbasis web dengan pendekatan hybrid Waterfall–Scrum. *JUTECH*, 6(1), 1–12.

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Fuady, A. (2021). *Seri Buku Training: Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogy)*. Jakarta: PT Human Persona Indonesia.
- Iswanto, D. (2023). Analisis RPJMD Kabupaten Tuban 2021–2026 dalam perspektif evidence-based policy. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 167–178.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2026). *SDGs Desa – Sistem Informasi Desa (SID) & Dashboard SDGs Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Open Government Indonesia. (2026). *Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2023–2024 dan dokumen pendukung*. Jakarta: Sekretariat Nasional OGI, Kementerian PPN/Bappenas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Utomo, D. I. P., & Wardhani, N. I. K. (2025). Kapasitas berinovasi penyelenggaraan desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 9(1), 77–91.